PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA (BPRS BDW) YOGYAKARTA



OLEH:

RETNO AMELIA NIM: 12390024

PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA (BPRS BDW) YOGYAKARTA



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

OLEH:

RETNO AMELIA NIM: 12390024

PEMBIMBING:

- 1. H. M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag
- 2. DIAN NURIYAH SOLISSA, S.H.I, M.Si

PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW Yogyakarta. Penelitan ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan data lapangan hasil wawancara dengan Direksi BPRS BDW Yogyakarta serta laporan keuangan triwulanan BPRS BDW yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW yang melalui proses identifikasi risiko, anilisis dan penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir risiko pada BPRS BDW masuk dalam kategori ringan. Hambatan yang dihadapi BPRS BDW dalam penerapan manajemen risiko berasal dari faktor internal dan eksternal. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut adalah dengan memastikan segala aktivitas bank sesuai SOP, melakukan pengawasan, serta melakukan pelatihan kepada pegawai.

Dalam analisis laporan keuangan BPRS BDW berkaitan dengan kesehatan bank menunjukkan pada periode Juni 2016 rasio KPMM sebesar 15,83%, rasio NPF sebesar 9,67%, FDR sebesar 86,89%, ROA sebesar 2,45% dan ROE sebesar 45,34%. Penilaian kesehatan BPRS BDW pada tahun 2015 dalam kategori cukup sehat.

Kata kunci: penerapan, proses, manajemen risiko, BPRS.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the implementation of risk management at BPRS BDW Yogyakarta. The type of this research is descriptive qualitative, with the field data are the results of interviews with Directors BPRS BDW Yogyakarta and BPRS BDW quarterly financial statements published by Bank Indonesia. This study focuses on the application of risk management at BPRS BDW through the process of risk identification, analysis, and risk assessment, risk monitoring and risk control. The results of this study indicate that in recent years the risk of the BRPS BDW included in the lightweight category. The barries that faced by BPRS BDW in implementation of risk management comes from internal and external factors. The strategies to minimize these obstacles is making sure all the bank's activities agree with SOP, supervising, and training the employees.

In the analysis of the BPRS BDW financial statements related with the bank's health showed that in the period June 2016, KPMM ratio at 15.83%, NPF ratio at 9.67%, FDR at 86.89%, ROA at 2.45% and ROE at 45.34%. the result of the health assessment of BPRS BDW in 2015 is healthy enough.

Keywords: implementation, process, risk management, BPRS.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Retno Amelia

Lamp: 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Retno Amelia

NIM

: 12390024

Judul Skripsi

: "Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW)

Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Keuangan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

Pembimbing I

H. M. Yazid Afandi, S. Ag., M.Ag.

NIP.19720913 200312 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Retno Amelia

Lamp: 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Retno Amelia

NIM

: 12390024

Judul Skripsi

: "Penerapan Manajemen Risiko Pada BPRS Bangun

Drajat Warga Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Keuangan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2016

Pembimbing II

Dian Nuriyah Solissa, S.H.I., M.Si

NIP.19840216 200912 2 004



PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: B-1259/Un.02/DEB/PP.05.3/09/2016

Skripsi/Tugas akhir dengan judul:

"Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama

: Retno Amelia

NIM

: 12390024

Telah dimunaqasyahkan pada

: 14 September 2016

Nilai Munagosyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Keuangan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:

Ketua Sidang

H. M. Yazid Afandi, S. NIP.19720913 200312 1 001

Penguji I

etyono, S.E., M.Si

NIP. 19730702 200212 1 003

Penguji II

Ibi Satibi S.H.I., M.si NIP. 19770910 200901 1 011

Yogyakarta, 25 Oktober 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan.

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Bismillahi Arrahmani Arrahīmi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama

: Retno Amelia

NIM

: 12390024

Jurusan-Prodi

: Keuangan Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

Penyusun

Retno Amelia

NIM. 12390024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ļ	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
٤	Jīm	j	je
٥	Ḥā'	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
٥	Dāl	d	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Rā'	r	er
ن	Zāi	z	zet
س	Sīn	S	es
m	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Þ ād	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ţā'	+	te (dengan titik di bawah)
	į a	ţ	te (dengan titik di bawan)
ظ	Żā'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	'Ain	۲	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
শ্র	Kāf	k	ka
ل	Lām	1	el
۴	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	Mutaʻaddidah
عدّة	Ditulis	ʻiddah

C. Tā' marbūṭah

Semua $t\bar{\alpha}$ ' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Ḥikmah

علة	ditulis	ʻillah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Ć	Fatḥah	ditulis	A
 -	Kasrah	ditulis	i
Ô	Dammah	ditulis	и

_				
	فعَل	Fatḥah	ditulis	faʻala
	ذُكر	Kasrah	ditulis	żukira
	یَدْهب		ditulis	yażhabu
	یَدْهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	Ā
جاهليّة	ditulis	jāhiliyyah
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	$ar{lpha}$
تَنسى	ditulis	tansā
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	аи
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	uʻiddat
لنن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الستماء	ditulis	as-Samā
الشَّمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	żawi al-furūḍ		
أهل السَنَة	ditulis	ahl as-sunnah		

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Retno Amelia

NIM

: 12390024

Program Studi: Keuangan Syari'ah

Departemen

: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seksama.

Yogyakarta, 14 Oktober 2016

Yang menyatakan

NIM: 12390024

\mathcal{MOTTO}

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaikbaik pelindung. (Qs. Ali Imron 173)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Keluarga tercinta Bapak, ibu, adik, serta keluarga tercinta Sahabat-sahabat tersayang

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Sang Baginda sejati, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya di *yaumil qiyamah* nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucap syukur akhirnya skripsi atau tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Untuk itu, penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- 2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
- 3. Bapak Mukhamad Yazid Afandi, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan dalam penelitian ini
- 4. Ibu Dian Nuriyah Solissa, S.H.I., M. Si selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini,
- 5. Seluruh Dosen Program Studi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dosen Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk Penyusun selama menempuh pendidikan,

- 6. Seluruh pegawai dan staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta seluruh staf di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Orang tua tercinta, Bapak Suprihno, Ibu Wartini, adikku Regina Apriyani, serta seluruh keluarga atas segala do'a, dukungan, kasih sayang dan motivasi kehidupan terbaik,
- 8. Sahabat-sahabat terbaik *Grup Dolan*, Arip, Bayu, Diah, Dimas, Eko, Garnis, Faisal, Titi, Ragil, Silvi, Tika, Tirta, Wisnu, Yuli, Yuni, Ja'far, Ulul, Ade, Rizka, Eka dan Anam yang telah menjadi sahabat terbaik dalam segala suasana.
- Seluruh teman-teman jurusan Keuangan Syariah angkatan 2012 yang telah berjuang bersama-sama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 10. Seluruh teman-teman KKN kelompok 191, Mirna, Titis, Marsiani, Zakiya, Singgih, Riski, Lutfi, Danang, Dimas yang telah berbagi suka duka selama pengabdian.
- 11. Semua pihak yang belum disebutkan namun banyak berjasa dalam penyelesaian skripsi ini,

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

Penyusun

Retno Amelia

NIM. 12390024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	i١
HALAMAN PENGESAHAN	V
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	хi
	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	χV
	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	1(
1.3 Tujuan Penelitian	1(
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II KERANGKA TEORI	13
2.1 Telaah Pustaka	13
2.2 Kerangka Teori	15
2.2.1 Risiko danManajemen Risiko	15
2.2.2 Jenis-Jenis Risiko	23
2.2.3 Proses Manajemen Risiko	33
2.2.4 Risiko Menurut Islam	4(
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	46
3.2 Subyek dan Obyek Penelitian	46
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.4 Sumber Data Penelitian	4
3.5 Teknik Pengumpulan Data	4
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.7 Gambaran Umum Objek Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Acuan dalam Penerapan Manajemen Risiko pada BPRS BDW	60
4.2 Jenis Risiko Utama pada BPRS BDW Yogyakarta	69
4.3 Hambatan dan strategi dalam Penerapan Manajemen Risiko BPRS BDW	76
4.4 Proses Manajemen Risiko BPRS BDW	79
1. Identifikasi risiko	80
2. Pengukuran dan pemetaan risiko	82
Fengukuran dan pemeraan fisiko Pemantauan dan mitigasi risiko	83
	85
4. Pengendalian dan pelaporan risiko	88
	88
5.1 Kesimpulan	00

5.2 Implikasi	90
5.3 Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
I AMDIDAN I AMDIDAN	



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL Tabel 1.1: Perkembangan BPRS di Indonesia	Gambar 2.1: Siklus Manajemen Risiko	33
Tabel 1.1: Perkembangan BPRS di Indonesia Tabel 1.2: perkembangan BPRS BDW Yogyakarta Tabel 2.1: pengukuran dari sisi laporan keuangan Tabel 3.1: Pendiri BPRS Bangun Drajat Warga DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1: Aset BPRS BDW Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Gambar 3.1: Logo BPRS Bangun Drajat Warga	52
Tabel 1.1: Perkembangan BPRS di Indonesia Tabel 1.2: perkembangan BPRS BDW Yogyakarta Tabel 2.1: pengukuran dari sisi laporan keuangan Tabel 3.1: Pendiri BPRS Bangun Drajat Warga DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1: Aset BPRS BDW Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		
Tabel 1.1: Perkembangan BPRS di Indonesia Tabel 1.2: perkembangan BPRS BDW Yogyakarta Tabel 2.1: pengukuran dari sisi laporan keuangan Tabel 3.1: Pendiri BPRS Bangun Drajat Warga DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1: Aset BPRS BDW Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		
Tabel 1.2: perkembangan BPRS BDW Yogyakarta	DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1: pengukuran dari sisi laporan keuangan	Tabel 1.1: Perkembangan BPRS di Indonesia	6
Tabel 2.1: pengukuran dari sisi laporan keuangan		8
Tabel 3.1: Pendiri BPRS Bangun Drajat Warga	· •	22
DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1: Aset BPRS BDW		52
Grafik 4.1: Aset BPRS BDW		
Grafik 4.1: Aset BPRS BDW		
Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta	DAFTAR GRAFIK	
Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta		
Grafik 4.2: Rasio FDR BPRS BDW Yogyakarta	Grafik 4.1: Aset BPRS BDW	68
		71
\mathcal{O}_{J}		74
Grafik 4.4: Penyisihan Penghapusan Aktiva BPRS BDW	— ·	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha. Dalam seluruh aktivitas perusahaan terdapat risiko yang dikarenakan adanya keterbatasan informasi untuk memprediksi kejadian dimasa datang, sehingga diperlukan manajemen risiko yang berguna untuk mencegah dan mengurangi dampak atas risiko tersebut.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert dalam Fahmi (2010) menyebutkan bahwa risiko adalah *uncertanly about future events*. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif (Fahmi, 2010, 2).

Kegiatan bisnis merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berbisinis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan konsekuensi baik itu kerugian maupun keuntungan. Tidak ada satu pun yang dapat menjamin bahwa bahwa bisnis yang dijalankan seseorang akan mengalami keuntungan

atau kerugian di masa depan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT "...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok..".(QS. Al-Luqman [31]:34). Sesuai dengan ayat tersebut bahwa setiap usaha yang dilakukan manusia pasti terkandung risiko didalamnya. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko.

Bank sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian pada bank bila risiko tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus dapat mengenal dan mengerti risiko-risiko yang mungkin timbul dalam seluruh kegiatan bank.

Kegiatan usaha bank syariah selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Perkembangan lingkungan bank syariah baik internal maupun eksternal menyebabkan risiko usaha perbankan syariah semakin kompleks. Oleh sebab itu, bank syariah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manejemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Bank Indonesia telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap berlandaskan prinsip syariah.

Konsep regulasi manajemen risiko bank secara internasional bersumber dari regulasi perbankan yang telah dirumuskan oleh komite basel. Basel III dikeluarkan sebagai respon dari krisis global pada tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum yang mengadopsi dari ketentuan Basel. Basel III terbit sebagai penyempurnaan atas Basel II. Secara khusus ada beberapa tujuan diterbitkannya Basel III. Pertama, untuk memperkuat aturan permodalan dan likuiditas. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan sektor perbankan dengan menambah cadangan modal untuk menyerap goncangan dari tekanan ekonomi dan keuangan serta mencegah menjalarnya krisis derivatif keuangan ke derivatrif ekonomi. Ketiga untuk meningkatkan kualitas manajeme risiko, tata kelola, transparansi dan keterbukaan. Keempat, memberikan resolusi terbaik bagi risiko sistematis bank lintas batas negara. (Wahyudi, 2013, 46)

Dalam Basel III mengedepankan beberapa hal yaitu: meningkatkan kualitas modal, lebih mengamankan perbankan dari pengaruh bank yang dinilai sistematik, dimana bank yang dinilai sistematik diminta menyediakan modal tambahan sebesar 1%-2,5%, mengurangi *procyclicality* dengan mengharuskan bank memelihara *countercyclical buffer* sebesar 0%-2,5%, meningkatkan daya tahan bank pada masa krisis dengan meminta bank menyediakan *capital conservation buffer* (Sudrajat, 2014)

Mengikuti IFSB (*Islamic Financial Service Board*) sebagai organisasi internasional yang menerbitkan berbagai prinsip dan standar tata kelola sebagai panduan untuk institusi keuangan Islam, ketentuan umum tentang

pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah tertuang dalam peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan jenis-jenis risiko perbankan syariah yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan. Pada peraturan tersebut BI menambahkan 2 risiko khusus yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu risiko imbah hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Penilaian kedua risiko tersebut dalam profil risiko mulai diberlakukan pada 2015 (Wahyudi, 2013, 58).

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa proses manajemen risiko yang harus dilalui. Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank (Rustam, 2013, 43).

Berkaitan dengan tanggung jawab perbankan syariah terhadap penerapan manajemen risiko, seluruh BUS dan UUS diwajibkan menyampaikan laporan yang diminta oleh otoritas pengawas seperti laporan profil risiko dan laporan lainnya. Laporan profil risiko memuat antara lain tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko. Bank juga wajib menyampaikan laporan lain pada saat terdapat kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank.

Risiko dan manajemen risiko merupakan suatu hal yang penting sehingga bank syariah harus menerapkan pengelolaan risiko sesuai dengan risiko yang dihadapi. Dalam pengelolaan risiko bank syariah, pegawai/staff bank syariah harus memiliki pemahaman terhadap risiko dan manajemen risiko. Pegawai bank syariah juga harus mampu mengidentifikasi risiko berkaitan dengan sumber, kemungkinan timbulnya serta dampak dari risiko yang akan dihadapi bank syariah. Pegawai bank syariah juga harus dapat menilai dan manganalisis risiko secara lebih mendalam agar dapat dilakukan evaluasi. Pemantauan serta pelaporan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh. Tak lupa bank syariah juga harus melakukan proses pengendalian risiko mencegah kerugian bahkan kebangkrutan yang dapat membahayakan bank syariah itu sendiri. Keempat hal tersebut diperlukan agar praktik manajemen yang dilaksanakan bank syariah menjadi efektif dan efisien.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Menurut Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah,

kecil dan mikro. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*).

Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Sektor UMKM ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. BPR Syariah merupakan BPR dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan berdasarkan prisnsip syariah termasuk pada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko BPRS tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. (Handoko, 2012, 5)

Menurut Statistik Perbankan Syariah jumlah BPR Syariah di Indonesia sendiri hingga Bulan Febuari 2016 berjumlah 164 Kantor. Selain dilihat dari jumlah kantor, perkembangan BPR Syariah juga dapat dilihat dari beberapa indikator seperti aset, DPK, pembiayaan, FDR, dan NPF.

Tabel 1.1
Perkembangan BPRS di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013 2014		2015	
Aset*	3.520.417	4.698.952	5.833.488	6.573.331	7.739.270	
DPK*	2.095.333	2.937.802	3.666.174	4.028.415	4.801.888	
Pembiayaan*	2.675.930	3.553.520	4.433.493	5.004.909	5.765.171	
NPF	6,11%	6,15%	6,50%	7,89%	8,20%	
FDR	127,71%	120,96%	120,93%	124,22%	120,06%	
	,	,	,	,	,	

^{*)} Dalam jutaan Rupiah. Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Feb 2016.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada aset, DPK dan pembiayaan BPR Syariah dari tahun ke tahun, juga diikuti dengan peningkatan NPF setiap tahunnya. Dari peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah hal ini juga diikuti dengan peningkatan NPF yang dimiliki oleh BPR Syariah. Hal ini membuktikan bahwa BPR syariah perlu menerapkan manajemen risiko kredit agar mencegah risiko pembiayaan BPR Syariah tidak melebihi dengan besarnya toleransi risiko kerdit yang telah ditetapkan oleh BPR Syariah.

Pada periode Juli 2016, di Provinsi D.I Yogyakarta menempati urutan ke empat dengan memiliki jumlah kantor BPRS sebanyak 12 kantor. Salah satu kantor BPRS yang berdiri di Yogyakarta adalah PT. BPRS Bangun Drajat Warga (BPRS BDW). BPRS Bangun Drajat Warga merupakan BPRS tertua kedua di Yogyakarta memiliki konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengembangkan dan mensosialisasikan pola dan sistem perbankan syariah. BPRS Bangun Drajat Warga juga menjadi pelopor berdirinya lembaga pembiayaan tanpa bunga dan sebagai pusat informasi bagi BPRS yang akan beroperasi di wilayah Yogyakarta (Anwar, 2014, 8).

BPRS Bangun Drajat warga yang mulai didirikan tahun 1993 hingga kini masih bertahan ditengah persaingan ketat di dunia perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hal ini tentu tidak lepas dari pengelolaan risiko yang dihadapi oleh BPRS BDW secara tepat, efektif, dan efisien. Penerapan manajemen risiko tersebut mulai dari identifikasi risiko, penilaian/ pengukuran risiko, pemantauan risiko, hingga pengendalian risiko.

Tabel 1.2

Data Keuangan BPRS BDW

Indikator	Mar-15	Jun-15	Sep-15	Des-15	Mar-16	Jun-16
Aset*	56.276	59.352	66.145	71.673	85.358	84.623
DPK*	17.214	18.391	20.691	24.814	23.720	23.670
Pembiayaan*	14.168	16.341	20.089	18.009	17.683	28.738
NPF	12,73%	11,90%	9,53%	8,81%	10,26%	9,67%
FDR	74,75%	80,30%	87,74%	77,37%	66,60%	86,89%

^{*)} Dalam jutaan rupiah. Sumber: BI, Laporan Keuangan BPRS BDW.

Periode bulan Juni 2016 laporan keuangan BPRS BDW Yogyakarta menunjukkan aset yang dimiliki BPRS BDW sebesar Rp. 84.623.807.000,00 dan sangat perkembang pesat dari tahun sebelumnya pada periode trriwulan ketiga yaitu sebesar Rp 59.352.564.000,00. Pada periode Desember 2015, beberapa rasio keuangan yang dimiliki BPRS BDW yaitu rasio NPF sebesar 10,26%, KPMM sebesar 17,65%, FDR sebesar 66,60%, ROA sebesar 2,75%, dan ROE sebesar 55,04%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, rasio keuangan BPRS BDW pada periode Juni 2016 adalah rasio NPF sebesar 9,67%, KPMM sebesar 15,83%, FDR sebesar 86,89%, ROA sebesar 2,45%, dan ROE sebesar 46,34%. Beberapa rasio keuangan tersebut dapat menunjukkan tingkat kesehatan BPRS DW Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2014) tentang praktik manajemen risiko di BPRS di Jawa Timur menyimpulkan bahwa secara parsial variabel pemahaman risiko dan manajemen risiko, pengawasan risiko serta analisis risiko kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktek manajemen risiko, sedangkan analisis dan penilaian risiko serta

variabel identifikasi risiko tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2014) tentang implementasi proses manajemen (controlling) pada pembiayaan mudhārabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menyimpulkan bahwa secara konsep BPRS Bangun Drajat Warga telah memahami prinsip bagi hasil pembiayaan mudhārabah, meski implementasi pembiayaan mudhārabah di lapangan belum dapat dilaksanakan sesuai konsep bagi hasil. Pengawasan pembiayaan mudhārabah telah terlaksana dengan baik secara praktik, sedangkan konsep pengawasannya belum tersusun rapi. Hal ini ditunjukkan dengan kurang matangnya perencanaan pengawasan pembiayaan mudhārabah. Prosedur penyelesaian pembiayaan mudhārabah telah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan koordinasi yang baik antara account officer, remidial, dan legal.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Penerapan Manajemen Risiko pada BDW)
Yogyakarta.

Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan manajemen risiko pada BPRS Bangun Drajat Warga Yoryakarta berdasarkan dengan proses manajemen resiko yaitu identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.

1.2 Perumusan Masalah

Berbicara mengenai manajemen risiko perbankan syariah terutama BPRS di Yogyakarta memang membutuhkah pembahasan yang cukup luas. Namun pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pembahasan manajemen risiko yang terdapat pada BPRS BDW Yogyakarta.

Berdasarkan pembatasan penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa dampak penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW?
- 2. Jenis risiko apa saja yang menjadi risiko utama dalam BPRS BDW Yogyakarta?
- 3. Apa yang menjadi faktor penghambat BPRS BDW dalam penerapan manajemen risiko serta strategi yang ditempuh untuk menanggulanginya?
- 4. Bagaimana proses manajemen risiko pada BPRS BDW Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan dampak penerapan manajemen risiko pada BPRS
 BDW Yogyakarta.
- Untuk menjelaskan risiko utama yang ada pada BPRS BDW Yogyakarta.
- 3. Untuk menjelaskan faktor penghambat bagi BPRS BDW dalam penerapan manajemen risiko serta Untuk menjelaskan strategi yang ditempuh oleh BPRS BDW Yogyakarta dalam menangani permasalahan risiko yang dihadapi..
- Untuk menjelaskan proses manajemen risiko pada BPRS BDW Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ilmu perbankan syariah, serta praktik manajemen risiko pada khususnya, memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pelaku perbankan syariah.

3. Manfaat Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perbankan syariah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran alur berpikir penyusun mulai awal penelitian hingga akhir penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab bahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bagian ini berupa pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan gambaran umum penulisan penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun baik berupa manfaat secara akademik, manfaat praktis maupun kontribusi

kebijakan, serta sistematika pembahasan yang merupakan gambaran secara singkat alur penyusunan penelitian ini.

Bab kedua dalam penelitian ini berupa landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: telaah pustaka berisikan kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, landasan teori sendiri menjadi acuan dalam pengembangan dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Bab ketiga berisi mengenai paparan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian tersebut akan menjelaskan mulai dari jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis penelitian, serta gambaran umum obyek penelitian.

Bab keempat terdiri dari uraian analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pembahasan lebih lanjut dari hasil penelitian tersebut serta berisi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian yang berisi kekurangan penyusun dalam melakukan penelitian ini serta saran yang diberikan penyusun untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskripstif, maka berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan:

- 1. Penerapan manajemen risiko BPRS BDW masih sangat sederhana. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemisahan antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. BPRS BDW menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008 yang mewajibkan Bank Syariah termasuk BPRS untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip pengenalan nasabah, dan perlindungan nasabah. Penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW mengacu pada aturan PBI dan OJK sebagai induk regulator. Manajemen risiko BPRS BDW juga mengacu pada peraturan internal yang melekan pada setiap SOP dan SE, meskipun aturan tentang manajemen risiko tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut. Manajemen risiko BPRS dikelola oleh kepala bagian, kepala divisi, SPI, dan pengurus BPRS BDW.
- Jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh BPRS BDW adalah sama dengan perbankan syariah pada umumnya. Yang menjadi risiko utama pada BPRS BDW adalah risiko likuiditas dan risiko pembiayaan. Risiko

likuiditas dan risiko pembiayaan menjadi risiko utama bagi BPRS BDW karena kedua risiko tersebut merupakan risiko yang terbesar dan paling sering terjadi pada BPRS BDW. NPF BPRS BDW pada periode Juni 2016 mencapai 9,67%. Itu menandakan pengelolaan risiko pembiayaan pada BPRS BDW dilaksanakan dengan kurang baik. Dari sisi likuiditas BPRS BDW dapat dilihat dari rasio FDR yang disajikan dalam laporan keuangan triwulan. Pada periode Juni 2016, FDR sebesar 86,89%. Hal ini berarti BPRS dapat memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, karena dapat menyalurkan pembiayaan sebesar 86,89% dari dana yang dihimpun.

3. Hambatan yang dihadapi BPRS BDW dalam menerapkan manajemen risiko adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu tingkat pemahaman pengelola risiko serta hambatan admisitratif yang terkait dengan SOP yang tidak diperbaharui secara berkala. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah ketentuan atau peraturan dan undangundang yang berlaku yang dapat menghambat proses penerapan manajemen risiko di BPRS BDW. Nasabah yang tidak kooperatif juga menjadi hambatan bagi BPRS BDW dalam menerapkan manajemen risiko. Sedangkan Strategi BPRS dalam meminimalisir risiko yatiu dengan memastikan semua aktivitas dan kegiatan BPRS BDW dilaksanakan sesuai SOP. Direksi membuat kebijakan yang dapat meminimalisir risiko. BPRS BDW juga menjaga komunikasi dan hubungan dengan nasabah agar tetap terjalin dengan baik sehingga dapat meminimalisis risiko. BPRS BDW juga memberikan pelatihan kepada

karyawan setiap tahunnya, salah satunya pelatihan tentang manajemen risiko.

4. Proses manajemen risiko pada BPRS BDW dimulai dari proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh kepala bagian di BPRS BDW. Kepala bagian mengidentifikasi terkait dengan karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas bank. Selanjutnya tahapan kedua adalah dilakukan analisis dan pemetaan risiko yang diketegorikan dalam tiga kriteria, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kepala bagian melaporkan kepada kepala divisi tentang risiko yang sedang dihadapi dan risiko yang dimungkinkan mucul, beserta dengan usulan langkah untuk memitigasi risiko. Kepala divisi melaporkan kepada direksi, dan direksi akan memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk memitigasi risiko tersebut. Proses ketiga yaitu pemantauan risiko. Proses pemantauan risiko pada BPRS BDW dilakukan oleh kepala divisi. Kepala divisi harus memantau segala aktivitas pada masing-masing divisi setiap saat, termasuk pemantauan terhadap risiko. tahapan terakhir yaitu pengendalian risiko. BPRS BDW melakukan pengendalian risiko dari awal yaitu dengan meastikan setiap aktivitas bank telah sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga risiko dapat diminimalisisr dan dikendalikan.

5.2 Implikasi

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian yang akan datang mengenai penerapan manajemen risiko pada BPRS diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

- 2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi BPRS BDW dalam mengevaluasi manajemen risiko yang selam ini diterapkan. BPRS BDW diharapkan selalu mengevaluasi dan memperbaharui SOP dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara berkala, terutama tentang manajemen risiko. Karena penerapan manajemen risiko menjadi salah satu cara BPRS BDW mempertahankan diri ditengah persaingan ketat perbankan di Yogyakarta.
- 3. Diharapkan OJK segera membuat atau merumuskan peraturan atau regulasi yang strategis dan fleksibel terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi BPRS, karena perlu diingat bahwa manajemen risiko dapat diterapkan dengan baik ketika ada kebijakan yang terstandardisasi.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran dari penelitian ini adalah

- 1. Bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya mengenai penerapan manajemen risiko untuk melakukan wawancara dan pengamatan yang lebih mendalam tentang manajemen risiko pada BPRS. Selain melihat dari sisi manajemen, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan melalui wawancara dengan *stakeholder* guna meneliti tentang manfaat penerapan manajemen risiko dari sisi *stakeholder*.
- Bagi BPRS BDW dalam mengatasi risiko likuiditas selain dengan meminjam dari bank lain maupun mencari nasabah lain, BPRS BDW juga dapat dengan mancari dana dari cadangan sekunder seperti SBI, deposito pada bank lain dan instrumen jangka pendek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-QUR'AN

Al-Qur'anul Karim. (2007). *Syaamil Al-Qur'an & Terjemahannya*. Bandung: Kiaracondong

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Arikunto, Suharsimi. (1991). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahmi, Irham. (2010). Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Ghony, M Junaidi, Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hanafi, Mamduh M. (2012). Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handoko, T Hani. (1984). Manajemen (Ed.2). Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2007). *Analitis Kritis terhadap Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idroes, Ferry N. Sugiarto. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Ed.5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, Tariqullah. Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko: Lembaga Keuangan Syariah*. (Ikhwan Abidin Basri, Penerjemah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 13*. Jakarta: Lentera Hati.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer. (2005). *Pengembangan analisis multivariate dengan SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Wahyudi, Imam. Miranti Kartika Dewi, dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiyanto, Mikha Agus. (2013). Statistika Terapan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widyarini. (2012). Manajemen Bisnis dengan Pendekatan Islam. Yogyakarta: Ekonisia.

SKRIPSI

- Anwar, Syaipul. (2014). Implementasi Proses Manajemen (Controling) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta Tahub 2012-2014 (Studi Pada Pembiayaan Mudharabah). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Iqlima, Jamilatul. (2015). *Penerapan Manajemen RisikoPembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Skripsi. Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yulianti, Murni. (2010). *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Juniarto. M.A, Andri Prastiwi. (2014). Praktik Manjemen Risiko Bank Umum Konvensional dan bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Pegawai Bank Umum yang Menempati Posisi di Bidang Akuntansi Manajemen di Kota Semarang). Diponegoro Journal of Accounting. Vol 3, No. 2. 1-14.
- Nazir, Mian Sajid, A. Daniel, M. M. Nawaz. (2012). *Risk Management Practices: A Comparation of Conventional and Islamic Banks in Pakistan*. American Journal of Scientific Research, 68 pp. 114-122.

Sudrajat, Pardi. (2014). *Dampak Basel III pada Perbankan dan Ekonomi*. Banker Association for Risk Management. 25 Januari 2014. http://www.bara.or.id/risk_management/regulation/basel/Basel_III

WEBSITE

www.ojk.go.id

www.bi.go.id

www.bprs-bdw.co.id



LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an

No.	Hal	Terjemahan						
1	42	Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)						
2	43	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18)						
3	44	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah : 195)						

Narasumber : Bapak Mardiyana, S. Pd.

Jabatan : Direktur

Hasil Wawancara

 Peraturan apa yang menjadi pedoman dalam penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW?

Secara khusus memang belum ada aturan yang mengatur tentang manajemen risiko d BPRS, kita ikut yang itu (13/23/PBI/2011). Dan untuk manajemen secara khusus menangani tentang risiko memang secara khusus tidak diwajibkan ada, tapi ya tetap menerapkan manajemen risiko,, karena risiko memang harus dicegah. BPRS memang belum ada aturan yang mewajibkan kita melaporkan manajemen risiko, untuk membuat direksi khusus kepatuhan itu belum ada. Tapi yang kita dengar dari arahan OJK, tapi kita belum lihat peraturannya, itu untuk BPR yang asetnya diatas 300 kalau tidak salah itu wajib ada direktur kepatuhan yang didalamnya sudah menangani risiko. SPI sudah menjadi kesatuan.

 Siapa saja yang berperan dalam penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW?

Yang berperan dalam penerapan manajemen risiko:

- 1. Pengurus (Direksi, dewan komisaris, DPS)
 - a. Direksi, menjalankan operasional, secara aktif memanage resiko yang dimungkinkan timbul dari mulai menganalisa hingga memitigasi risiko.

- b. Komisaris, merupakan pengawas pada aktivitas operasional mulai dari pelayanan, keuangan, likuiditas.
- c. Dps berperan aktif dalam risiko operasional terutama risiko kepatuhan syariah, agar segala aktivitas yang dilakukan BPRS tidak menyimpang dari aturan atau fatwa DSN MUI. Berkaitan dengan pendapatan yang tidak halal yang diperoleh BPRS tentu akan berpengaruh terhadap reputasi BPRS BDW, dll.
- 2. Direksi juga memberikan kewenangan kepada kepala divisi yaitu divisi operasional dan marketing untuk berperan aktif dalam mengelola risiko di BPRS BDW. Pada divisi operasional yang terkait adalah risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko pembukuan. Sedangkan pada divisi marketing adalah risiko hukum, pembiayaan dsb. Kepala divisi juga memberi wewenang kepada kepala bagian agar lebih spesifik lagi dalam mengelola risiko.
- 3. Peran SPI sebagai pemantau harian di setiap kepala bagian. Misalnya di bagian pembukuan jika ada pembukuan yang salah SPI yang memantau. Atau misalnya mingguan pada bagian jasa dana prosentase likuiditas kita berapa maksimal 9% SPI lah yang memantau, ini sudah warning ini, harus segera diambil tindakan. SPI/audit internal melakukan pemeriksaan pada divisi kebawah, menyesuaikan antara SOP dan pelaksanaan, dan risiko2 apa yang akan timbul.
- 3. Jika memang belum ada peraturan yang mengatur tentang BPRS dari OJK, lalu apa yang dijadikan pedoman dalam penerapan manajemen risiko di BPRS BDW?

Pada prinsipnya setiap aktivitas di BPRS BDW, baik dalam pelayanan, pembiayaan ataupun pembukuan itu pasti ada SOP. Standar operasional prosedur itu disusun untuk memperlancar sebuah aktivitas. Sebenarnya tentang manajemen risiko itu acuanya melekat pada setiap SOP yang ada dan juga setiap peraturan perundang-udangan yang ada maupun SE yang ada. Dalam aturan itu kan sudah ada tentang meminimalisisr risiko, walaupun tidak secara eksplisit tentang risiko itu dimunculkan. Misalnya pada SOP pembiayaan, didalamnya kan sudah ada kemungkinan risiko serta antisipasinya. Dalam AO, dalam pembuatan proposal itu juga harus dimunculkan risiko calon pembiayaan yang akan kita berikan itu apa saja,dan mitigasinya apa. Kalau dia bisa menyebutkan risiko tapi tidak bisa memberikan solusinya ya sudah tidak perlu dipilih. Misalnya seperti itu. Dalam SOP tersebut sudah ada kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang mengurangi atau meminimalkan sebuah risiko, kalau itu dijalankan dengan baik. Dianggap pokoknya tidak ada risiko. Risiko itu timbul biasanya kalau menyimpang dari SOP yang ada. Risiko timbul juga bisa dari ekstern seperti karena kebijakan, kondisi makro ekonomi, karena nasabah memang nakal. Tetapi dari intern kita sudah mengantisipasi sejak awal dari SOP, kalau SOP itu dijalankan 100% sesuai dengan SOP nya, itu Inshaallah risiko yang dari dalam itu sudah tidak ada.

4. Apa yang menjadi risiko utama bagi BPRS BDW?

Yang menjadi risiko utama itu risiko likuiditas dan risiko pembiayaan. Itu yang paling banyak masalahnya. Kalau yang lain ada tapi ya cuma sedikit.

5. Terkait dengan proses manajemen resiko, apa saja proses manajemen risiko pada BPRS BDW?

Prosesnya ya sama.

6. Bagaimana proses identifikasi risiko pada BPRS BDW?

Mulai dari masing-masing kepala divisi, secara umum kita ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu dilakukan kalau di tingkat kepala bagian itu setiap bulan sekali setiap awal bulan. Dalam laporan kepala bagian tersebut akan menyampaikan pertama kinerja pada bulan lalu, yang kedua adalah kendala yang muncul, yang ketiga adalah risiko, risiko yang timbul pada bulan tersebut maupun risiko yang dimungkinkan timbul, jadi ya identifikasi sebuah risiko, dan usulan penyelesaian, serta lain-lain diantaranya dinamika dalam pelaksanaan kerja. Yang berkaitan dengan risiko ada dua tadi, yaitu risiko atau permasalahan yang timbul di bulan kemarin, apa yang sudah dilaksanakan, identifikasinya seperti apa, hingga risikonya besarannya atau risiko itu berat, sedang atau ringan, dan yang sudah dilakukan apa. Ini merupakan penyampaian evaluasi risiko. selain itu juga disampaikan identifikasi risiko yang kemungkinan timbul kedepan. Itu masing-masing bagian sesuai dengan jobnya masing-masing. Contohnya bagian pembiayaan menyampaikan ini sudah ada nasabah A,B,C yang sudah mulai nunggak, kemungkinan risikonya adalah apa, terus kita mengidentifikasi akadnya sudah, legalitasnya sudah kuat atau belum, perikatan terhadap jaminan sudah oke atau belum, APHT nya sudah terpasang atau belum, yudisialnya dari dok sudah keluar atau belum, itu harus diketahui, rangsum-rangsum dalam akad sudah sesuai SOP atau belum. Misalnya dibagian jasa dana, mislanya risiko likuiditas, ada deposan kita yang jatuh tempo pada bulan yang akan datang, misalkan pada bulan Juli ada pencairan deposito besar misalnya 10 Miliyar maka kita ada risiko likuiditas, apa yang harus kita laksanakan, identfikasinya apa, apakah kita terlebih dahulu sowan atau menanyakan apakah akan di roll over atau diambil. Dan jika diambil kita harus disiapkan tentunya, dan ini berkaitan dengan bagian funding, berarti kita harus cari dana lain agar kita tidak terjadi risiko likuiditas.

Identifikasi risiko dilakukan oleh kepala bagian pada setiap masingmasing bagian tetapi yang menentukan kebijakan yang akan diambil dan
mengeksekusinya adalah direksi. Jika terjadi kemugkinan risiko yang akan
timbul kepala bagian harus melaporkan kepada kepala divisi, dan kepala
divisi menyampaikan kepada direksi dan tidak harus melalui rapat
koordinasi. Pada bagian jasa dana pelaporan dilakukan setiap minggu.
Setiap hari sabtu harus melaporkan kondisi cash flow likuiditas, karena
likuiditas merupakan hal yang sangat beresiko jika kita tidak jaga dengan
baik.

7. Bagaimana proses pengukuran dan pemetaan risiko pada BPRS BDW?

Cara pengukuran risiko merupakan cara spesifik pada masing-masing bagian, cara mengukurnya dengan berapa risiko atau kerugian yang dimungkinkan timbul dari identifikasi risiko yang disampaikan masing-masing bagian. Hanya itu, dan itu akan kelihatan nanti. Misalnya dibagian pembiayaan, menyampaikan ada 10 pembiayaan yang

dimungkinkan risiko akan timbul, setelah diidentifikasi itu nanti akan kelihatan, dari 10 itu yang perikatanya sudah bagus dan secara legal bank itu kuat itu dianggap tidak berat, tapi ada yang kemarin tanda tangan dari istri tidak ada itu kan beresiko, itu termasuk risiko berat, jaminanya tidak mencukupi itu juga termasuk berat, atau orangnya sudah pergi atau dicari dirumah dan informasi dari tetangga itu termasuk berat. Penentuan kriteria ditentukan bersama pada rapat. Kriteria risiko tidak dinilai dari nominal, berdasarkan berapa kerugian yang dimungkin timbul. Sebenarnya kita ada rapat tidak hanya pada satu bulan itu, masingmasing bagian ada rapat. Pada bagian jasa dana hari senin pagi ada minimal meeting tentang likuiditas, bagian pembiayaan setiap selasa, bagian remidial setiap kamis. Ya itu khusus untuk pembiayaan bermasalah yang 10 tadi misalnya remidial itu setiap kamis kita akan memetekan, terus kira-kira apa langkah kita, meningkatkan perikatan, somasi, atau langsung apprasial untuk pelelangan.

8. Bagaimana perlakuan untuk risiko dalam kriteria ringan, sedang, dan berat?

Perlakuan adalah action kita untuk penyelesaiannya, apakah itu harus langsung segera diselesaikan, apakah ada sebuah toleransi, atau istilahnya kita harus mengambil follow up terlebih dahulu berkaitan dengan administrasi dan lain sebagainya. Contohnya tadi kalau ada 10 pembiayaan, yang berat itu adalah kriterianya misalnya pembiayaan tersebut perikatannya tidak kuat, jaminannya tidak mencukupi, orangnya sudah tidak kooperatif, itu termasuk berat. Kalau yang sedang

perikatannya sudah bagus tapi orangnya sulit ditemui misalnya. Kalau ringan ini mungkin cuma telat, kurang komunikasinya, cari informasi dulu.

Likuiditas, kriterianya sesuai dengan tingkat risiko yang harus kita tanggung. Contohnya ada deposito sekian M yang harus diambil itu kan termasuk berat. Kita harus segera mengantisipasi mencari solusi agar itu tidak terjadi. Bukan berarti tidak jadi itu tidak boleh diambil, boleh, karena itu hak mereka. Tapi bagaimana kita tetep bisa menutupi dengan keuangan yang ada. Bisa mencari deposan yang lain, bisa dengan pembiayaan ke bank lain. Jadi manajemen dana dalam risiko likuiditas sangat diperlukan, bagaimana terjadi balance sheet antara kebutuhan keuangan cash money dengan penggunaannya. Kita harus senantiasa setiap hari dipantau.

9. Bagaimana proses pemantauan risiko pada BPRS BDW?

Kabag yang memantau dan beratanggung jawab atas proses pemantauan risiko. Kabag harus setiap hari memantau risiko. bahkan kabag jasa dana bukan hanya setiap hari memantau, tapi harus setiap jam. Dan dia harus memantau pada aktivitas di setiap kantor, kantor kas dan kantor cabang. Alhamdulillah kita sudah online jadi bagian jasa dana setiap jam kabag jasa dana kita perintahkan untuk dia memantau kondisinya. Semua teller yang ada di counter harus melaporkan, laporan secara online. Dana atau uang yang ada di berangkas itu selalu kelihatan. Saya juga bisa melihat, tapi sudah dilimpahkan kewenangannya ke kabag. Saya sesekali melihat,

jadi bisa sesegera. Makanya agar likuiditas tidak terganggu maka kita ada peraturan jika ada pengambilan diatas 100 juta itu harus ada pemesanan sehari sebelumnya, kalau hari sabtu kalau ada pengambilan diatas 5 juta harus ada order sebelumnya. Kita buat peraturan agar nasabah itu bisa memahamilah, sehingga kita juga bisa menyiapkan, nanti kesannya kok uangnya tidak ada. Padahal kan sebenarnya uangnya ada, Cuma kan posisinya uang nya tidak ready di berangkas. Nasabah utama kita dalam arti nasabah yang besar, deposan besar, kita bisa untuk komunikasi bagus, sehingga beliau-beliau ini kalau mengambil uang pasti ada perencanaan, kalau tiba-tiba kan sangat repot.

10. Bagaimana dengan proses pengendalian risiko? apa strategi yang digunakan untuk mengendalikan risiko pada BPRS BDW?

Strategi memastikan bahwa setiap aktivitas tidak menyimpang dari SOP, karena jika terjadi penyimpangan maka akanterjadi risiko. strategi lain adalah pengawasan. Pengawasan adalah bagian strategi agar kita tidak melanggar SOP. Maka peran dari kepala bagian, SPI, itu sangat ketat disitu. Walaupun sudah diawasi aja masih ada penyimpangan kok.

11. Bagaimana dengan pelaporan penerapan manajemen risiko pada BPRS BDW?

Ke intern berasama itu secara berkala dalam rapat. Kalau kepada OJK ya kita laporan tahunan. Laporan yang di publikasi di website BI secara triwulanan memang tidak spesifik tentang manajemen risiko. kalau manajemen risiko ya masuk dalam laporan tahunan. Jadi kita membuat

laporan tahunan baik dari laporan keuangan, laporan operasional, termasuk disitu manajemen risiko yang diterapkan dalam tahun itu yang kita laporkan kepada OJK. Dalam laporan itu termasuk rasio-rasio tentang risiko bank dan juga ada mitigasinya. Misalnya rasio likuiditas, rendah, mitigasinya apa. Rasio BOPO, misalnya biaya operasional melebihi ketentuan itu risikonya laba turun, mitigasinya apa, untuk kedepan seperti apa. Kita melaporkan secara global. Tidak ada kriteria tinggi, rendah sedang. Tinggi rendah sedang itu ya action kita disini, agar itu stepnya biar temen-temen yang memitigasi atau menyelesaikan risiko tersebut agar risiko tidak semakin luas biar menjalankannya ada prioritas. Yang berat memang harus lebih dulu. Kalau laporan ke OJK ga seperti itu, tidak ada matriks. Cuma tadi misalnya analisa rasio, perminggu dilaporkan misal pada bulan juni-juli karena idul fitri risiko likuiditasnya tinggi karena memang pengambilannya banyak, jadi mitigasinya apa. Kalau pembiayaan, pada bulan ini terjadi kenaikan tingkat rasio NPF, berartikan risiko pembiayaannya naik, action planya apa. Contohnya ya eksekusi jaminan, restrukturisasi nasabah. Disini memang yang paling banyak masalahnya adalah risiko likuiditas dan risiko pembiayaan. Untuk risiko yang lain ada tapi relatif lebih sedikit. Misalnya risiko syariah ketika terjadi restrukturisasi itu setiap bulan setiap hari ada, ada konversi akad itu kadang pemahaman kita dengan pemahaman DPS berbeda, kita dianggap keliru, dan itu biasanya dari DPS mengatakan itu harus diubah lagi, sudah selesai kan, kalau tidak nanti akan ada risiko syariah, syariahnya anda melanggar ketentuan dari fatwa DSN. Ya jadi kita rubah.

Atau tidak kita rubah tapi pendapatan itu adalah non halal maka anda tidak boleh mengambil pendapatan itu, memasukkan pendapatan itu kepada pendapatan non halal. Seperti bunga bank itu ya, ya itu harus dimasukkan ke pendapatan non halal. Kan gitu. Itu actionnya apa, permintaan dari DPS sperti itu, tapi itu jarang sekali kadang setahun sekali lah.I

12. Bagaimana menurut bapak tentang risiko yang lainnya, selain risiko likuiditas dan risiko pembiayaan?

Risiko pasar menurut saya hanya dampak, dampak dari pelayanan, action kita, aktivitas kita, dampak dari personal kita kan, misalnya kita sakit gigi dalam melayani, orang yang waktu itu kita layani akan cerita dengan yang lain. Itu dampak, jadi kita juga perlu memperhatikan itu juga. Jadi tiap tahun kita anggarkan pelatihan service excellent,untuk pelatihan peningkatan personality, itu pasti ada setiap tahun biasanya di awal tahun bulan maret-april. Ini untuk nge-charge lagi walaupun itu sudah pernah, tapi kan seiring berjalannya waktu orang itu kan bisa tidak semangat, karena bisa banyak tanggungan banyak masalah dirumah.

Selain itu, risiko pembiayaan kan bisa berdampak pada risiko hukum juga kan, misalnya ternyata perikatannya itu tidak kuat, itukan termasuk risiko hukum juga, disamping pembiayaannya kita rugi, risiko hukumnya kita juga kalah ketika itu nanti ke pengadilan. Selama ini risiko hukum ya pernah sih tapi alhamdulillah, makanya kita dalam mengidentifikasi itu nanti kita kan lihat kita tu posisinya dimana to, kalau posisi kita secara

hukum kalah, ya kita jangan fight dong, kita justru agak merendah terus kita pendekatan secara personal. Kita sentuh dari sisi psikologis, dari sisi agama, hutang itu tidak hanya di dunia, kan juga sampe sana (akhirat), kita jangan justru naik untuk lelang, untuk pengadilan, jangan. Kita kan merasa salah ini, waktu akad KTP nya sudah expired, kita kalah itu, ga bisa. Makanya kan ketika identifikasi risiko itu kita harus melihat dulu posisi kita. Sehingga bisa jadi itu risiko pembiayaan berat tapi tidak masuk pelelangan karena secara hukum kita kuat. Jadi bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lainnya. Makanya kita tadi follow up nya tidak harus sama, tergantung masing-masing kasus.

Eksekusi itu tetap kewenangan direksi, jadi kepala bagian setelah melaporkan dan mengusulkan sebuah langkah termasuk kepala divisi karena dia yang bertanggung jawab diatasnya, tetep eksekusi dari kita. Penentuan langkah selanjutnya tetap kita, ini dilelang, ini disomasi aja, ini dengan pendekatan persuasif, atau ini kita buatkan parsel saja.

13. Bagaimana dengan peranan komisaris berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di BPRS BDW?

Komisaris kan representasi dari pemilik kan, mewakili dari pemilik, jadi dia bagaimana melakukan pengawasan agar operasional bank ini lancar dan tidak terjadi risiko yang merugikan bank dan pemilik, sehingga kan dia senantiasa secara umum setiap bulan kita ada rapat dengan komisaris, termasuk didalamnya pelaporan tentang risiko-risiko yang dihadapi bank. Sebatas beliau meminta laporan pertanggung jawaban, dan memberikan solusi yang dimungkinkan untuk dilaksanakan.

14. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan manajemen risiko di BPRS BDW?

Faktor penghambat:

- 1. Intern, dari pemahaman kita. Karena kita kadang-kadang tidak satu pemahaman. Walaupun sudah diputuskan satu nasabah itu sudah masuk kategori berat, tapi antara kepala bagian, kepala divisi dan direksi bisa berbeda kan. Misalnya kami mengatakan bahwa ini bisa diselesaikan dengan persuasif, tapi yang lain bilang tidak bisa, harus lelang. Ini yang jadi pnghambat. Karena kita tidak teksbook. Karena kalau teks book yo pahamlah.
- 2. Kalau penghambat dr luar itu adalah ketentuan atau undang-undang yang berlaku, misalnya kita inginnya lelang itu berlangsung cepat, tapi kan ternyata stepnya kan panjang, apalagi nanti ketika nasasbah itu menggugat, itu prosesnya lebih panjang lagi, kan resiikonya jadi tambah besar, biaya menjadi tambah banyak lagi. Ada juga faktor dari nasabah sendiri yang tidak menyadari dia terus melawan kan gitu ya.
- 3. Yang ketiga dari administratif, itu mungkin SOP yang mestinya kan setiap tahun harus di update ya, itu kan kadang karena terlalu banyak pekerjaan jadinya kan updatenya terlambat, kadang ada syarat atau ketentuan baru, ada perkembangan jaman yang baru sehingga tidak cepat melakukan mitigasi risiko. Walaupun sudah ada SOP tapi karena sudah expired ternyata masih timbul juga risikonya.

15. Apa strategi yang digunakan dalam menanggulangi dan meminimalisir risiko?

Cara menanggulanginya tentu berbeda-beda tergantung bagaimana tingkat risiko bagi bank, tingkat keamanan bagi bank, itu yang menyebabkan kita berbeda cara menerapkan strategi. Tapi secara umum strategi kita itu menyelesaikan sebuah risiko yang timbul itu dengan cara lebih ke persuasif, bagaimana kita agar itu tidak mejadikan risiko yang lebih besar lagi. berusaha mengantisipisasi dari awal, pembuatan SOP, pelaksanaan, pengawasan yang terus menerus. Walaupun SOP sudah dijalankan dengan baik, pengawasan dengan baik terus menerus tapi tetap timbul risiko, ya strategi kita ya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan risiko yang muncul, bisa dengan persuasif, bisa dengan hukum lebih cepat menyelesaikan. Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap risiko juga termasuk strategi kami dalam mencegah risiko.

16. Bagaimana kondisi risiko secara keseluruhan pada BPRS BDW beberapa tahun belakangan ini?

Kondisinya aman terkendali. Termasuk dalam kategori ringan. Kalau berat kan kita sudah mendapat teguran, kalau berat kan itu biasanya baik dari komisaris, kalau itu menyangkut masalah keuangan pasti sudah ada hal-hal yang perlu dibenahi. Setiap tahun kita juga diperiksa oleh OJK tentunya sudah termasuk disitu. Dan kalau berat lagi kan itu nanti akan menjadi bank dalam perhatian khusus. Kalau kita kategorinya masih ringan. Sehingga penilaian dalam perbankan pun kita masih dalam kategori cukup sehat. NPF kita memang termasuk tinggi lebih dari 7%,

kita kemarin 8%. Tapi kan memang kesehatan tidak ditopang dari NPF saja. Ada likuiditas, manajemen, dan lain-lain.

17. Bagaimana tentang budaya sadar risiko pada BPRS BDW?

Secara umum memang budaya sadar risiko harus ditingkatkan. Sehingga kita memang perlu ada pelatihan yang terus-menerus. Walaupun secara teori sudah tau, tetapi karena sesuatu yang digunakan terus menjadi hal yang biasa itu seolah-olah nanti akan berpikir bahwa ketika aktivitas tidak sesuai dengan SOP dan sedikit menyimpang ternyata tidak beresiko, padahal kan sebenarnya itu termaasuk beresiko. Suatu contoh misalnya identitas yang sudah expired, KTP sudah tidak berlaku lagi. Pada saat mengajukan (deposito, tabungan, pembiayaan) itu masih berlaku, tetapi pada tengah perjalanan identitas itu habis masa berlakunya. Tapi karena sudah berjalan dan sehingga merasa tidak perlu untuk diperbaharui, dan jika ada permasalahan kan itu akan sangat beresiko bagi kita. Jadi timbulnya risiko itu tidak serta merta tapi mungkin dalam jarak waktu yang lebih lama. Misalnya satu contoh ringan seperti itu, itu ringan yang fatal.

18. Harapan untuk OJK?

Sebuah peraturan sebenarnya kan memang mutlak diperlukan. Karena suatu aktivitas jika tidak ada peraturan akan menjadi liar. Tetapi harapan kita peraturan tersebut adalah peraturan yang bersifat agak fleksibel. Tidak terlalu menekan. Kita memang menyadari di dunia perbankan itu memang banyak risiko yang dihadapi dan mungkin timbul, sehingga begitu banyaknya peraturan yang ada. Sehingga menurut kami antara

mendukung, misalnya peraturan tentang reputasi dan pembiayaan itu kadang kan kadang bertolak belakang dengan program perluasan jaringan, perluasan pasar. Tentang perluasan pasar kan biasanya nasabah inginnya proses yang mudah cepat, tidak ribet, tapi kan padahal aturan tentang pembiayaan mengharuskan ada syarat-syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi dan dengan proses yang panjang. Tetapi mutlak harus ada. Tapi khusus untuk peraturan BPRS saya rasa aturan bagi yang memiliki aset diatas 300M itu sudah sangat baik. Tapi bagi kami yang masih kecil untuk belajar menerapkan manajemen risiko sesuai SOP dan peraturan yang ada.

Lampiran 3

Neraca BPRS BDW (dalam ribuan rupiah)

No	Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Juni 2015	Posisi September 2015	Posisi Desember 2015	Posisi Maret 2016	Posisi Juni 2016
	AKTIVA						
1	Kas	195,736	541,965	348,262	333,303	378,699	380,795
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	19,004,733	17,040,093	15,775,009	22,725,130	35,558,196	20,234,590
4	Piutang Murabahah	20,622,081	23,475,104	27,917,773	28,283,729	29,794,827	33,570,971
5	Piutang Salam	0	0	0	0	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0	0	0	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	10,693,004	12,158,331	15,722,018	14,363,497	14,368,780	14,764,784
8	Pembiayaan Musyarakah	3,475,737	4,182,763	4,367,311	3,645,535	3,315,076	13,973,369
9	Ijarah	151,702	136,570	119,030	400,087	385,555	371,651
10	Qardh	17,729	16,829	15,929	7,800	6,900	6,000
11	Piutang Multijasa	279,386	246,342	290,681	276,437	285,177	320,849
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	850,609	736,778	762,363	1,047,295	1,212,180	1,311,423
13	Aktiva Istishna'	0	0	0	0	0	0
14	Persediaan	0	0	0	3,000	118,000	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	2,199,248	2,248,450	2,254,299	2,286,439	2,220,354	2,206,799

16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	1,087,20	3 1,146,500	1,160,15	1,243,290	1,219,895	1,248,448
17	Aktiva Lain-Lain	1,575,07	1,189,395	1,257,65	1,639,380	5 1,358,757	1,353,870
	JUMLAH AKTIVA	56,276,61	59,352,564	66,145,44	71,673,752	2 85,358,246	84,623,807
No	Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Juni 2015	Posisi September 2015	Posisi Desember 2015	Posisi Maret 2016	Posisi Juni 2016

No	Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Juni 2015	Posisi September 2015	Posisi Desember 2015	Posisi Maret 2016	Posisi Juni 2016
	PASIVA						
1	Kewajiban Segera	30,266	32,266	41,696	41,768	40,966	38,782
2	Tabungan Wadiah	17,214,328	18,391,303	20,691,222	24,814,962	23,720,524	23,670,615
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0
4	Kewajiban Lain-Lain	3,077,150	2,593,213	3,794,692	2,284,482	3,899,903	3,537,827
5	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0	0	0	0	0
6	Pinjaman Subordinasi	0	0	0	0	0	0
7	Modal Pinjaman	0	0	0	0	0	0
8	Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0	0	0	0	0
	a. Tabungan Mudharabah	15,662,880	16,331,622	17,770,756	17,854,826	17,857,946	17,175,155
	b. Deposito Mudharabah	14,267,905	15,360,805	16,736,082	18,044,082	30,729,882	31,666,392
9	Ekuitas:	0	0	0	0	0	0
	a. Modal Disetor	2,290,040	3,660,040	3,660,040	3,660,040	3,660,040	3,660,040
	b. Tambahan Modal Disetor	1,370,000	0	0	1,339,960	1,339,960	1,339,960

II	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0	0	0	0	0
	d. Cadangan	1,997,126	1,997,126	1,997,126	1,997,126	1,997,126	2,378,620
	e. Saldo Laba(Rugi)	366,920	986,189	1,453,834	1,636,506	2,111,899	1,156,416
	JUMLAH PASIVA	56,276,615	59,352,564	66,145,448	71,673,752	85,358,246	84,623,807

Lampiran 4.

Analisis perkembangan rasio keuangan BPRS BDW

Periode	NPF (%)	ROA (%)	ROE (%)	FDR (%)	KPMM (%)
Mar-15	12,73	2,98	57,52	74,75	16,49
Jun-15	11,90	3,29	54,84	80,83	15,82
Sep-15	9,53	3,27	67,62	87,74	13,41
Des-15	8,81	2,58	48,05	77,73	16,32
Mar-16	10,26	2,75	55,04	66,60	17,65
Jun-16	9,67	2,45	45,34	86,89	15,83
max	12,73	3,29	67,62	87,74	17,65
min	8,81	2,45	45,34	66,60	13,41
rata-rata	10,48	2,89	54,74	79,09	15,92



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA



Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta Telp. (0274) 413552, 389877 Fax (0274) 452424 Email: bprs.bdw@gmail.com
Kantor Cabang Bantul : Jl. Jenderal Sudirman, No.79, Bantul Telp. (0274) 6460543 (Kompleks Balai Muslimin)
Kantor Kas Ngipik : Jl. Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul Telp/Fax (0274) 373584
Kantor Kas Sedayu : Jl. Raya Wates Km. 10, Argosari, Bantul Telp. (0274) 6498425

SURAT KETERANGAN NO: 0208/BDW/Ops/VIII/2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Direksi PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dengan ini menerangkan bahwa

Nama

: Retno Amelia

TTL No. Mhs

: Magelang, 13 Maret 1993 : 12390024

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi

: Keuangan Syariah

Universitas

: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan tugas penelitian di PT. BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai syarat penulisan skripsi dengan judul : "Penerapan Manajemen Risiko Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta"

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016 PT SYARL'AH BDW >

> Dana Suswati, SE Direktur Utama

Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah

CURRICULUM VITAE

• Data Pribadi

Nama : Retno Amelia

TTL : Magelang, 13 Maret 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Domisili : Clapar Rt 05 Rw 07, Ngawen, Muntilan, Magelang

Telepon : 081 915 434 004

Email : retnoamelia24@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1999 – 2005 : MI Muhammadiyah Ngawen

2005 – 2008 : SMPN 2 Muntilan

2008 – 2011 : SMKN 1 Tempel

2012 – sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

